

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO.  
0176/Pdt.G/2016/PA.Ska TENTANG PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM AKAD MURĀBAHAH PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI**



**Disusun Sebagai Salah Satu Menyelesaikan Studi Strata 1 Pada Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:**

**ADE INDRA**

**I000160069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD  
MURĀBAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :


**ADE INDRA**

**I000160069**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Drs. Harun, M.H.**

**NIDN: 0605085701**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD  
MURĀBAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

**OLEH  
ADE INDRA  
I000160069**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 3 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Drs. Harun, MH.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Yayuli, S.Ag., M.PI**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. M. Mu'inudinillah Basri, MA**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)



**Dekan,**

**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.**

**NIDN. 0605086402**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Januari 2020

Penulis,



**ADE INDRA**  
**I000160069**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD  
MURĀBAHAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

**Abstrak**

Pokok permasalahan antara nasabah dan bank syariah sering diakibatkan oleh gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut, gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur berikut (ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal) Hakim telah memutuskan menolak gugatan Penggugat dan memenangkan pihak tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad *Murābahah* dan sinkronisasi putusan tersebut berdasarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murābahah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berdasarkan data normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan dan mendeskripsikan hasil utama dari masalah, kemudian membedah dengan menganalisis objek penelitian dengan sumber data primer dan sekunder. Hasilnya bahwa, berdasarkan Putusan Hakim perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska sengketa ekonomi syariah ini, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak menyalahkan tindakan Para Tergugat yang melakukan proses lelang agunan atau objek jaminan. Hal tersebut sudah sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT yang memberikan hak kewenangan bagi Tergugat untuk melelang objek jaminan karena wanprestasinya Penggugat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan lahirnya Peraturan Petunjuk Lelang maka eksekusi Hak Tanggungan tidak lagi didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang berbunyi, pelaksanaan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan adalah melalui penetapan Pengadilan, Pasal tersebut merupakan suatu kemunduran dikarenakan hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini, karena telah ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang Hak Tanggungan yang berkekuatan hukum. Berdasarkan mekanisme dalam putusan hakim pada perkara nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska yang memenangkan pihak Tergugat atau menolak gugatan Penggugat, secara yuridis sudah sesuai dan selaras dengan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang ketentuan akad *Murābahah* dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan fatwa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa alasan (pertimbangan) hakim dalam proses mengadili perkara dalam putusan tersebut.

**Kata kunci:** putusan hakim, *murābahah*, sengketa, perkara, fatwa dsn-mui.

**Abstract**

The main problem between customers and Islamic banks is often caused by a lawsuit against the law. According to article 1365 of the Civil Code, each act inherits the

law, which brings harm to others, requires that those who, due to wrong issuance of losses, replace the losses, the Plaintiff's claim can only be granted if they are able to prove the fulfillment of the following elements (there is an action, there is an error, there is an error loss, and there is a causal relationship) The judge has decided to reject the Plaintiff's claim and win the defendant's party. This study aims to determine the judge's consideration in completing case No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska concerning Acts Against the Law in the Mura Agreement *bahah* and the synchronization of the decision based on Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murābahah* Contracts. This type of research includes field research, the method used is a qualitative method, based on normative data. This study uses a descriptive-analytic approach that is collecting and describing the main results of the problem, then dissect by analyzing the research object with primary and secondary data sources. The result is that, based on Judge's Decree on Case No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska this Islamic economic dispute, the Panel of Judges who tried the case did not blame the actions of the Defendants who conducted the auction process for collateral or collateral objects. This is appropriate and true based on the provisions stipulated in Article 20 paragraph (1) of the UUHT which gives the Defendant the right to authority to auction off the object of collateral because of the default of the Plaintiff and Regulation of the Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 concerning Guidance for Tender Implementation. With the issuance of the Bidding Directive Regulation, the execution of the Mortgage Rights is no longer based on Article 224 HIR and Article 258 RBg which reads, the execution of the auction execution of the Mortgage Rights object is through the determination of the Court, the Article is a setback because it is considered to be no longer relevant, because there are specific regulations governing Underwriting Rights that have legal force. Based on the mechanism in the judge's ruling on parkara number 0176/Pdt.G/ 2016/ PA.Ska who won the Defendant's party or rejected the Plaintiff's claim, is legally appropriate and in line with DSN-MUI Fatwa guidelines No. 47/DSN-MUI/II/2005 concerning the provisions of the *Murābahah* contract and alternative dispute resolution based on the fatwa. This can be seen from the existence of several reasons (considerations) of judges in the process of hearing cases in the decision.

**Keywords:** judge's decision, *murābahah*, dispute, case, fatwa dsn-mui.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat, bahkan bank konvensional sendiri banyak membuka cabang anak bank syariah salah satunya ditandai dengan pertumbuhan bank-bank Syariah di Indonesia. Karena lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang berkurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan perspektif hukum Islam, keberadaan bank syariah semakin kuat dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur Perbankan Syariah UU No. 21

Tahun 2008, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara pihak, sebab-sebab terjadinya sengketa di antara pihak sebagai berikut: Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Kerugian salah satu pihak; dan Adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian.

Pokok permasalahan antara nasabah dan bank syariah salah satu diakibatkan oleh gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHPerdara adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan persepsi masyarakat yang dalam hal ini sebagai nasabah (Penggugat), bahwa putusan hakim seoleh-oleh yang dimenangkan adalah pihak yang berkuasa yang dalam hal ini adalah Tergugat atau yang merasa terdzholimi adalah biasanya orang kecil yaitu dari Nasabah yang tidak bisa berbuat apa-apa dihadapan hukum. padahal pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kenapa bisa memenangkan pihak Tergugat. Sehingga dalam skripsi ini untuk mengubah persepsi masyarakat tersebut, karena tidak selamanya Nasabah (Penggugat) yang menjadi korban bahkan justru sebaliknya apabila para pihak bisa membuktikan bahwa tersangka terbukti telah melakukan pelanggaran berdasarkan jawaban, pembuktian dan dalil atau alasan yang berkuat hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang di atas suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh hakim kepada salah satu pihak yang merasa dirugikan yang dalam hal ini sebagai Penggugat, memberikan pemahaman dan solusi kepada para pihak khususnya masyarakat yang dalam hal ini Penggugat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi berjudul, ***“Analisis Putusan Hakim Perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI”***.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mengumpulkan data secara langsung. Dengan mengedepankan proses interaksi

komunikasi atau hubungan personal yang mendalam antara peneliti dengan yang memutuskan perkara atau yang mewakili.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik berdasarkan data normatif yang mengkaji studi dokumen, berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan perkara ekonomi syariah, yang nantinya menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, berupa catatan maupun lisan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 273, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155.

Metode pengumpulan data ini yang penelitian lakukan dengan melakukan wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam hal ini peneliti yang mewawancarai Ketua Hakim, Panmud Hukum selaku Pembimbing dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta serta dokumentasi berupa salinan putusan perkara, gambaran umum lokasi penelitian dan foto yang berkaitan dengan pokok penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan yang diterapkan dalam permasalahan yang ada, dengan pola pikir induktif yaitu suatu proses pengumpulan data dan setelah terkumpul maka dilakukan analisis data, melalui penyimpulan secara induktif *aposteriori*.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang perbuatan melawan hukum gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 19 Februari 2016, yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa antara Penggugat adalah debitur yang telah mendapat fasilitas pembiayaan dari



Tergugat selaku kreditur lembaga perbankan syariah berupa Fasilitas Pembiayaan Kredit *Murābahah*.

Nasabah (Penggugat) melakukan pembiayaan Akad *Murābahah*, dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah secara cicilan atau angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, sebagai jaminan berupa: “Tanah dan bangunan dengan SHM No. 464/Papahan GS No.1302/1977 atas nama xxxxx, terletak di Papahan Tasikmadu Karanganyar Jawa Tengah, Luas  $\pm 1.440$  m<sup>2</sup>, selanjutnya disebut objek sengketa”, awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan usaha akhirnya Penggugat mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban membayar angsuran, langkah Tergugat akan melakukan upaya proses lelang eksekusi terhadap objek sengketa melalui Kantor Turut Tergugat I untuk pelunasan kewajiban pembiayaan *Mur ā bahah* yang diberikan pada Penggugat.

Tergugat telah menanggapi permohonan Penggugat keringanan pembayaran angsuran berdasarkan: Surat Tergugat No. 237/PUK/BMI-SLO/3/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Persetujuan Prinsip Revisi Jadwal Angsur dan Restruktur Fasilitas Pembiayaan *Murābahah*. Surat Tergugat No. 412/PUK/BMI-SLO/3/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Persetujuan Prinsip Revisi Jadwal Angsur Fasilitas Pembiayaan *Murābahah*. Tergugat juga telah memberikan berkali-kali peringatan atau teguran kepada Penggugat sebagaimana: Surat Peringatan No. 360/MBI-SLO/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 (“Surat Peringatan I”); Surat Peringatan No. 430/MBI-SLO/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 (“Surat Peringatan II”); Surat Peringatan No. 470/MBI-SLO/VII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 (“Surat Peringatan III”).

Berdasarkan hal tersebut dengan dikeluarkannya Surat Penggugat I, II, dan III, Penggugat seharusnya memberikan tanggapan, berdasarkan putusan tertulis Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap surat peringatan-peringatan tersebut seperti tidak peduli lagi atas kewajibannya kepada Tergugat, sehingga cukup jelas dan terbukti bahwa Penggugat sendirinya yang sebenarnya telah ingkar

janji/wanprestasi dan beritikad buruk dalam mencari-cari alasan untuk tidak membayar angsuran kepada Tergugat. Sudah sangat tepat dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat melakukan proses eksekusi lelang terhadap objek sengketa melalui Turut Tergugat I adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR yakni pelaksanaan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan tanpa melalui penetapan putusan Pengadilan adalah cacat hukum oleh karena melanggar hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam 224 HIR dan melanggar asas kepatutan. Demikian proses lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat melalui Kantor Turut Tergugat I, adalah bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintahan Republik Indonesia dan hukum acara perdata serta jelas asas kepatutan sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

### **3.2 Pembahasan**

Berdasarkan Putusan Hakim perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska kasus ekonomi syariah ini, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak menyalahkan tindakan Para Tergugat yang melakukan proses lelang agunan atau objek jaminan. Hal tersebut sudah sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT yang memberikan hak kewenangan bagi Tergugat untuk melelang objek jaminan karena wanprestasinya Penggugat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan lahirnya Peraturan Petunjuk Lelang maka eksekusi Hak Tanggungan tidak lagi didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang berbunyi, pelaksanaan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan adalah melalui penetapan Pengadilan, Pasal tersebut merupakan suatu kemunduran dikarenakan hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini, karena telah ada peraturan yang mengatur tentang Hak Tanggungan yang berkekuatan hukum.

Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dan benar sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pedoman akad *Murābahah* dalam ketentuan Ketiga: Jaminan dalam *Murābahah* dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 Ketentuan Bagi Nasabah Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Objek *Murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; dan
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

Menurut penulis, berdasarkan jawaban dan pembuktian tersebut bahwa Penggugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban angsuran kepada Tergugat, walaupun sudah berkali-kali diberi peringatan dan keringanan oleh Tergugat, Penggugat masih tidak memenuhi kewajibannya. Artinya, dalam hal ini berdasarkan dalil di atas Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji dan para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan proses lelang agunan atau objek jaminan sudah sesuai dan benar menurut Undang-undang Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI.

Dalam menyikapi keputusan Majelis Hakim Pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji berdasarkan jawaban dan pembuktian tersebut, menurut penulis sudah benar dengan memperhatikan dalil-dalil di atas. Bahwa di dalam ketentuan hukum yang mengatur perihal tersebut, apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Debitur (Penggugat) tidak melaksanakan isinya atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya maka telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, maka keputusan Hakim bersifat mengikat bagi para pihak yang bersangketa berdasarkan dalil di atas bahwa Hakim memutuskan Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ingkar janji berdasarkan jawaban dan pembuktian menurut keterangan para pihak dan pengakuan Penggugat. Tergugat dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga apa yang menjadi dalil penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum atas proses lelang agunan atau objek jaminan harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang megadili perkara tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Nasabah (Penggugat) melakukan pembiayaan Akad *Mur ā bahah*, dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah secara cicilan atau angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan usaha akhirnya Penggugat mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban membayar angsuran, Penggugat mengakui telah wanprestasi/ingkar janji yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya kepada Tergugat sebagaimana tertulis dalam putusan (posita Penggugat angka 2). Langkah Tergugat akan melakukan upaya proses lelang terhadap agunan melalui Turut Tergugat I untuk pelunasan kewajiban pembiayaan Akad *Murābahah* yang diberikan kepada Penggugat.

Penggugat menyatakan Tergugat melalui Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum (PMH) adalah berdasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang berbunyi, pelaksanaan eksekusi lelang objek Hak Tanggungan adalah melalui penetapan Pengadilan, Pasal tersebut merupakan suatu kemunduran dikarenakan hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini, karena telah ada peraturan yang mengatur tentang Hak Tanggungan yang berkekuatan hukum, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT yang memberikan hak kewenangan bagi Tergugat untuk melelang objek jaminan karena wanprestasinya Penggugat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dasar yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan mewalan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur berikut (ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal), Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui Turut Tergugat I dan Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan mekanisme dalam putusan Hakim perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska yang memenangkan pihak Tergugat/menolak gugatan Penggugat, secara yuridis sudah sesuai dan selaras dengan pendoman Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang ketentuan Akad *Murābahah* dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan fatwa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa alasan (pertimbangan) Hakim dalam proses mengadili perkara dalam putusan tersebut. Berdasarkan dalil Hakim bahwa tindakan Tergugat mengajukan permohonan untuk pelelangan agunan atau objek jaminan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUHT yang memberikan hak dan kewenangan bagi Tergugat untuk melelang objek jaminan karena wanprestasinya Penggugat dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (**“Peraturan Petunjuk Lelang”**).

#### **4.2 Saran**

Bagi pihak Nasabah (Penggugat) dalam mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah harus berhati-hati dan lebih teliti dalam memahami akad perjanjian dan haruslah bertanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuatnya atau yang telah diperjanjikan. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa ekonomi syariah.

Kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan perjanjian Akad *Murābahah* hendaklah selalu memperhatikan konsep-konsep dasar sesuai dalam prinsip syariah, guna menghindari setiap tindakan-tindakan menyimpang yang bertentangan dengan syariah dan di dalam perjanjian harus dicantumkan penyelesaiannya jika terjadi sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55, yaitu melalui Musyawarah/Keluargaan, Mediasi Perbankan, BASYARNAS, dan Pengadilan Agama.

Kapada Aparat Penegak Hukum khususnya Majelis Hakim, apabila hendak menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan perkara ekonomi syariah, fatwa tersebut diangkat sebagai pendapat Hakim, sehingga mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada pertimbangan bagi Hakim.

Kepada Para Peneliti berikutnya hendaknya mengembangkan minat untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam terhadap putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah, karena tugas kita bersama untuk mengawasi dan mengontrol jalannya Peradilan yang adil dan profesional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Kitab Lengkap Undang-undang Hukum (Perdata, Acara Perdata, Pidana dan Acara Pidana) Tahun 2016, Tim Pustaka Buana.
- Musjtari, Dewi Nurul. (2016). *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Sarwono. (2016). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.